



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN PNS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2019**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA
KEPEGAWAIAN PNS PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajah, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas-tugas dibidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas didalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berkinerja tinggi sangat diperlukan pengembangan dan dukungan dari berbagai sistem yang ada yang dapat memudahkan implementasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui pengembangan sistem informasi manajemen maupun sistem informasi yang lain. Salah satu bentuk upaya adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian yang menyajikan laporan atau informasi tentang riwayat data kepegawaian untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karir pegawai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan didalamnya mempunyai kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan data kepegawaian untuk disajikan dalam bentuk aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM. Program Aplikasi Simpeg SKPD yang dimaksud dapat beroperasi dalam jaringan Online dengan sistem intranet maupun internet (*Web Based Application*), sehingga dapat digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi data keseluruhan secara otomatis. Dengan demikian, dapat dihasilkan informasi yang akurat dan akuntabel dalam pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Guna lebih mengoptimalkan dalam pengoperasian dimaksud, perlu disusun suatu kegiatan rapat bimbingan teknis bagi pejabat pengelola Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah. Rumusan langkah tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 48 (empat puluh Delapan) satuan SKPD sesuai SOTK baru yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
- b. kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengoperasian Aplikasi Simpeg Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian.

2. Tujuan

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
- c. Tersedianya fungsi komunikasi dan penyediaan informasi dalam jaringan interaktif dengan Pengelola Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah
- d. Mempercepat dan mempermudah proses integrasi, pertukaran, pengumpulan dan penyebaran informasi kepegawaian antara SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- e. Terwujudnya tenaga pengolah data pegawai di setiap SKPD yang memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi;
- f. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pertemuan dengan pengelola kepegawaian masing-masing SKPD dan pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD maupun penyelenggaraan pertemuan penghubung dengan mengundang pengelola kepegawaian seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- b. Penyelenggaraan bimtek (bimbingan teknis) serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada Aplikasi Simpeg yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan kepegawaian khususnya bagi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2019											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK			■					■				
2	Penggandaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Rapat Teknis Penghubung			■					■				
4	Koordinasi/Konsultasi		■	■	■	■		■	■	■	■		
5	Bimtek Simpeg Skpd						■						
6	Belanja Pengembangan Aplikasi									■			

G. KELUARAN

Keluaran dari Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Terselenggaranya komunikasi yang terus-menerus antara pengelola kepegawaian SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan BKD Provinsi Jawa Tengah.
2. Bertambahnya pengetahuan pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai Informasi Kepegawaian.
3. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian yang akurat dan *up-to-date*.
4. Untuk meningkatkan layanan administratif dan pembinaan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Memberikan layanan informasi kepada *stakeholder* secara cepat, tepat dan *up-to-date*
6. Dengan dilakukannya pengembangan aplikasi, semakin banyak informasi yang dapat dihasilkan.
7. Persamaan persepsi dalam pengolahan data pegawai melalui peningkatan kemampuan aparatur Pengolah data, sehingga mampu menjawab segala permasalahan di bidang pengolahan data pegawai yang pada akhirnya memberikan supporting data kepada Pimpinan dalam mengambil keputusan.
8. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke SKPD.
9. Menyediakan informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian.
10. Tersosialisasinya Pengelolaan Aplikasi Simpeg Provinsi Jawa Tengah beserta sub sistem pendukungnya

H. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Semarang, Maret 2019
KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG. SH, MM

Pembina

NIP. 197001131989032002